

## 2021

## RENCANA KINERJA (RKT) 2023 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS



Jl. R.A. Kartini No.18/23 Makassar, Sulawesi Selatan

6

Telepon: 0411 - 3624058

Faximile: 0411 - 3634667

@

Email: info@pn-makassar.go.id



Website: www.pn-makassar.go.id

## RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023 SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Uraian	Indikator kinerja	2023	Program	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1 Terwujudnya	a. Persentase sisa perkara	3 100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	5 - Percepatan Penyelesaian - Perkara	6 - Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum	7 DIPA TA.2023
Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI			Teraulan Omulii	- Perkara Hukum - Perseorangan	- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tk. pertama dan tk. banding tepat waktu	DII A IA. ZOZJ
	<ul> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>Perdata</li> <li>Pidana</li> <li>Tipikor</li> <li>Niaga</li> <li>PHI</li> </ul>	100%					
	c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	10%					
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding	90%					
	- Kasasi - PK e. Persentase Perkara	90% 90% 5%					

		Diselesaikan dengan Diversi						
		Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85% (Indeks 3,4)					
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul> <li>Percepatan Penyelesaian</li> <li>Perkara</li> <li>Perkara Hukum</li> <li>Perseorangan</li> </ul>	<ul> <li>Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum</li> <li>Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tk. pertama dan tk. banding tepat waktu</li> </ul>	
	b	. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5%					
	C.	c. Persentase berkas 1 perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu						
	d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90%					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	DIPA TA.2023
	b.	. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL (tidak mempu nyai zetting plaat)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul><li>Percepatan Penyelesaian Perkara</li><li>Perkara Hukum Perseorangan</li></ul>	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	NIHIL (tidak mempunyai zetting plaat)
	C.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan	DIPA TA.2023

	Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)						
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul> <li>Percepatan Penyelesaian</li> <li>Perkara</li> <li>Perkara Hukum</li> <li>Perseorangan</li> </ul>	<ul> <li>Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum</li> <li>Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tk. pertama dan tk. banding tepat waktu</li> </ul>	Perkara perdata tidak dibiayai negara
Meningkatnya dukungan Sekretariatan sebagai	a. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	DIPA TA.2023
Supporting Unit Pengadilan	b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional kantor:						
	- DIPA 01	93%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	DIPA TA.2023
	- DIPA 03	94%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul> <li>Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>Perkara Hukum Perseorangan</li> <li>Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</li> </ul>	<ul> <li>Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum</li> <li>Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan</li> <li>Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</li> <li>Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tk. pertama dan tk. banding tepat waktu</li> <li>Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung</li> </ul>	DIPA TA.2023

c. Persentase Pengelolaan Belanja Modal	100%	Program Manajemen	Dukungan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Realisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Layanan Peradilan	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	DIPA TA.2023

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 8 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

SIGO FRIYONO, S.H.,M.H. MP. 196504121992121001